

buletin **Bina Marga**

Menyambung Negeri

Edisi 35 2024

Ditjen Bina Marga Dukung Peringatan HUT ke-79 RI di IKN

MARGA UTAMA

Kementerian PUPR Fokus
Penyelesaian Jaringan
Jalan Tol IKN

MARGA KHUSUS

Ditjen Bina Marga Sigap
Tangani Bencana
di Sumbar

MARGA INFO

Jalan Jayapura-Wamena
Dibangun Melalui KPBU
Senilai Rp3,3 Triliun

MARGA DAERAH

Kejuaraan Gateball Nasional
Beri Efek Ekonomi ke Kota
Tangerang

binamarga.pu.go.id





Foto: Jalan Nasional di IKN Nusantara

buletin Bina Marga

Menyambung Negeri

Pelindung

Direktur Jenderal Bina Marga

Pemimpin Umum

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga

Dewan Redaksi

Para Direktur di lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kepala BPJT
dan Sekretaris BPJT

Pemimpin Redaksi

Kabag Hukum & Komunikasi Publik

Redaktur Pelaksana

Ketua Tim Komunikasi Publik

Redaksi

Girly Kurniati
Riko Dwiputra
Angelia A.W
Hasian LT

Kontributor

Kabag / Kasubag TU BB/BPJT
di lingkungan Ditjen Bina Marga

Fotografer

Ahmad Furqon
Fajar Dwi Putra

Desain / Tata Letak

Sarotona Zega
Imam Warmanto

Administrasi

Wulandari Wurjanti

Tata Usaha

Martina Piranti

f @puprbinaamarga

X @pupr_binamarga

▶ pupr_binamarga

📷 pupr_binamarga

🎵 @pupr_binamarga

Ditjen Bina Marga Dukung Peringatan HUT ke-79 RI di IKN

Pemerintah Republik Indonesia berencana memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung rencana tersebut.

Menteri PUPR yang merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan prasarana IKN hampir selesai. Infrastruktur jalan di IKN dapat digunakan pada Agustus 2024.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mendukung pelaksanaan upacara bendera di IKN. Untuk itu pihaknya melakukan percepatan pembangunan jalan menuju IKN Nusantara.

"Kami menyiapkan jalan tol akses menuju IKN, jalan nasional menuju IKN, dan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPPP) IKN. Selain jalan tol dan jalan nasional, BBPJT Kaltim juga mendapatkan tugas untuk membangun Bandara WIP IKN dan Dermaga Logistik IKN," ungkap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) Kaltim Reiza Setiawan.

Selain fokus pada pembangunan, Ditjen Bina Marga juga sigap tatkalala bencana melanda. Seperti pada bencana yang terjadi di Sumatra Barat (Sumbar), Ditjen Bina Marga pun siap mendukung kinerja Kementerian PUPR dengan segera membuka akses.

Seperti kita ketahui, banjir dan longsor yang melanda Sumbar terjadi setelah curah hujan yang tinggi pada Sabtu – Minggu, 11-12 Mei 2024. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Thabrani, menjabarkan usaha yang telah mereka lakukan di masa tanggap darurat. Untuk masa pemulihan seperti saat ini, pihaknya menargetkan ruas jalan Padang Panjang – Sicincin bisa beroperasi penuh pada 30 Oktober 2024.

Yang jelas, baik itu pembangunan, pemeliharaan, atau pemulihan pasca bencana, faktor kualitas infrastruktur harus diutamakan. Hal lain yang juga tidak boleh dikesampingkan adalah soal keselamatan. Hal inilah yang ditekankan dalam sebuah webinar bertajuk, "Lesson Learn Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan serta Evaluasi Pengoperasian Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada Ruas Jalan KPBU di Sumatra Selatan", Selasa, 28 Mei 2024.

"PU dituntut bekerja dengan cepat tapi tetap kita harus menjaga keselamatan dan (ada) waktu (bagi kita) untuk evaluasi," kata Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan dalam sambutan membuka webinar.

Konstruksi infrastruktur harus menjamin keselamatan, mulai dari pembangunan sampai infrastruktur tersebut beroperasi. Insan Kementerian PUPR diminta untuk menjaga betul faktor ini supaya bisa mewujudkan *zero accident* dan infrastruktur yang dibangun andal dan berkelanjutan.

MARGA UTAMA

5 Kementerian PUPR Fokus
Penyelesaian Jaringan Jalan Tol IKN

10 Infografis:
Jaringan Konektivitas IKN

MARGA KHUSUS

12 Ditjen Bina Marga Sigap Tangani
Bencana di Sumbar

14 Keselamatan adalah Harga Mati
dalam Proyek Infrastruktur

16 Kartun:
Sigap Tangani Bencana



MARGA INFO

17 Jalan Jayapura-Wamena Dibangun
Melalui KPBU Senilai Rp3,3 Triliun

18 Ditjen Bina Marga Tingkatkan SDM
Bidang Kompetensi Umum

19 PUPR Lanjutkan Pembangunan
Jalan Tol Berjuluk 'Atlantis'

20 Presiden Resmikan 165 Km Jalan
Daerah di 15 Kota Sulawesi Tenggara

21 Ditjen Bina Marga Tingkatkan SDM
untuk Tangani Aduan Publik

22 Ditjen Bina Marga Selenggarakan
Raker untuk Percepat Kinerja

23 Jalan yang Andal Menjamin
Kesejahteraan Masyarakat

25 Pelantikan dan Pisah Sambut
Dirjen Bina Marga

26 Bakal Ada Lomba Balap
Gokart Listrik di IKN

27 111 Km Tol JORR 2 Tersambung
Penuh Setelah Tol
Cimanggis-Cibitung Diresmikan

MARGA INOVASI

29 Pembangunan Jalan Daerah Bisa Sampai
Pelosok Berkat Inovasi LPSKT

MARGA DAERAH

31 Kejuaraan Gateball Nasional Beri
Efek Ekonomi ke Kota Tangerang

32 Jalan Nasional Sulsel Pakai
21.000 Ton Aspal Buton

33 9 Jembatan Tua di Jatim
Diganti Dengan Biaya Rp591,9 Miliar



MARGA GALLERY

34 Rapat Kerja Direktorat Jenderal
Bina Marga 2024

35 Pelantikan dan Pisah Sambut
Direktur Jenderal Bina Marga

Kementerian PUPR Fokus Penyelesaian Jaringan Jalan Tol IKN



Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung rencana pemerintah untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

Menteri PUPR yang sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan prasarana IKN hampir selesai. Infrastruktur jalan di IKN dapat digunakan pada Agustus 2024.

“Jadi IKN kalau 17 Agustus (2024), Insya Allah siap prasarananya, PUPR tanggung jawab pada prasarananya. Pelaksanaan di Sekretariat Negara,” ujar Basuki di Semarang, Senin, 17 Juni 2024.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra mendukung pelaksanaan upacara bendera di IKN. Untuk itu pihaknya melakukan percepatan pembangunan jalan

menuju IKN Nusantara yang mencakup jalan tol IKN, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung, Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

“Juga termasuk Jalan Bebas Hambatan Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko, Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Simpang Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, dan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang Tiga ITCI,” ujarnya, saat menemani kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke IKN, Selasa, 2 Juli 2024.

Percepatan pembangunan jalan tol dan non tol ini, tambah Rachman, juga dilakukan untuk mempersingkat jarak tempuh ke IKN Nusantara. “Ruas jalan tol dan



non tol kita percepat, sehingga biasanya waktu jarak tempuhnya 2,5 jam, maka dengan fungsionalisasi Tol 3A, 3B, 5A, dan 6A, waktu tempuh bisa 70-71 menit. Seksi 6B belum ya,” jelasnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Reiza Setiawan menambahkan terkait beberapa infrastruktur jalan di IKN yang dipercayakan pada Dijiten Bina Marga. “Kami menyiapkan jalan tol akses menuju IKN, jalan nasional menuju IKN, dan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Selain jalan tol dan jalan nasional, BBPJN Kaltim juga mendapatkan tugas untuk membangun Bandara VIP IKN dan Dermaga Logistik IKN,” ungkap Reiza melalui jawaban tertulis saat membalas korespondensi Buletin Bina Marga, Jumat, 28 Juni 2024.

Jalan yang sedang dibangun oleh BBPJN Kaltim untuk konektivitas menuju IKN antara lain adalah Jalan Tol IKN Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B, Seksi 6A, Seksi 6B. Tidak hanya jalan tol, jalan nasional juga dibangun, yakni: Jalan Nasional Sepaku; Jalan Bypass Pasar Sepaku; Jalan KKT. Kariangau; Dan jalan-jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Adapun saat ini yang dalam pengerjaan adalah Seksi 3A Segmen Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km, dan Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang dengan panjang 6,68 km.

Kemudian Seksi 5B Segmen Jembatan Pulau Balang-Bandara VIP sepanjang 13 km. Seksi 6A Segmen Bandara VIP-Rencana Outer Ring Road KIPP sepanjang 6,22 km dan Seksi 6B Segmen Exit Tol Outer Ring Road KIPP-Rencana Inner Ring Road KIPP yang berada di Simpang ITCI sepanjang 6,18 km.

Sementara untuk Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggang-Tol Balsam dengan panjang 8,35 km, lalu Seksi 4A Segmen IKN Simpang Tempadung-Rencana Outer Ring Road (RR) KIPP sepanjang 17,1 km dan Seksi 4B Segmen Exit Tol Outer Ring Road KIPP-Rencana Inner Ring Road KIPP sepanjang 2,3 km. Kemudian Seksi 2 merupakan Jalan Tol Balsam yang sudah *eksisting* saat ini sepanjang 2,89 km.

“Untuk Seksi 1 belum dibangun. Masih dalam proses desain. Saat ini dalam proses kajian untuk Seksi 4A dan 4B. Jadi dari Seksi 3B, naik ke atas, akan mempersingkat waktu ke KIPP,” papar Reiza.

Ke depan, Reiza mengungkapkan, nantinya dibangun Seksi 6C. Bukan jalan tol, tetapi jalan bebas hambatan yang tidak berbayar. Menghubungkan wilayah Penajam Paser Utara (PPU) ke dalam wilayah KIPP IKN. PPU bersama Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara adalah daerah penyangga IKN. Dengan demikian, total panjang 7 seksi pada Tol IKN ini mencapai 59,82 km.

“Jalan tol ini masih menunggu arahan pimpinan. Nantinya pada awal operasional untuk berbayar, harus ada kajian lalu lintas harian. Sementara masih disebut

jalan bebas hambatan tidak membayar. Kita lihat nanti ke depan seperti apa fungsinya. Apakah membayar atau tidak, ada kajian-kajian khusus mengenai itu,” ungkapnya.

Untuk dapat menghubungkan KIPP IKN dari Balikpapan, lanjut Reiza, maka rencana jalan yang akan fungsional di bulan Agustus adalah Jalan Tol IKN Seksi 3B, Seksi 5A. Dari situ, jalan melewati Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang dan Bentang Pendek. “Kemudian melewati Seksi 5B kemudian melalui jalan nasional untuk menuju ke KIPP.”

Saat ini, per akhir Juni 2024, pembangunan jaringan jalan IKN telah mencapai sekitar 75,73% “Kami optimis bahwa jaringan jalan menuju IKN akan siap dan dapat beroperasi pada 17 Agustus 2024 mendatang,” ujar Reiza.

Pada bagian lain, BBPJN Kaltim juga mendapatkan penugasan khusus mengerjakan dua infrastruktur untuk Bandara VIP IKN. “Jadi bandara (VIP IKN) dibagi dua sisi pembangunannya. Untuk sisi (landasan) udara, seperti *runway*, *taxiway*, dan apron dikerjakan Kementerian PUPR. Sedangkan sisi darat, untuk terminal dan gedung lainnya dikerjakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” kata Reiza.

Penyelesaian pembangunan Bandara VIP dan pendukungnya terus dikebut. Mengingat bandara tersebut akan digunakan untuk pesawat kepresidenan dan tamu-tamu kenegaraan lainnya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait, yakni Kementerian Perhubungan.

Pengaturan Akses

BBPJN Kaltim bisa dibilang sebagai salah satu tuan rumah dalam perhelatan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Isu penting yang patut diperhatikan adalah akses dan mobilitas. Apalagi, akan ada banyak tamu undangan yang datang.

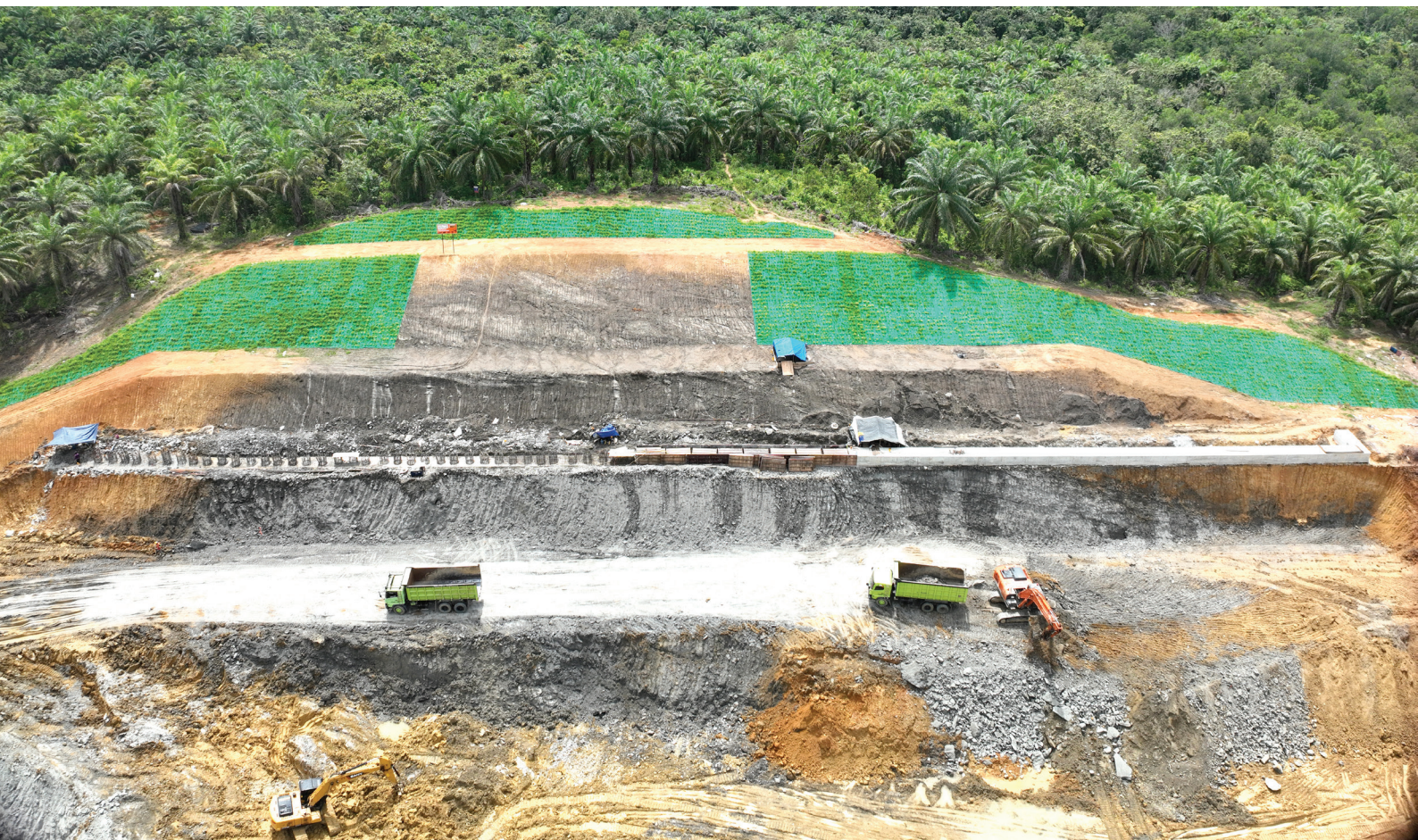
Untuk mengantisipasinya, Kementerian PUPR menyiapkan dua alternatif jalan yang bisa digunakan bagi undangan dan masyarakat. “Jadi tidak hanya lewat jalan tol, tetapi ada banyak yang melalui Jalan Sepaku-Semai,” papar Reiza beberapa waktu lalu.

Bagi pengguna jalan tol, kata dia, melalui Seksi 3A, 3B, dan 5A Tol IKN. Ruas jalan bebas hambatan itu dimulai dari jalan nasional di Km 13 Jalan Soekarno Hatta-Balikpapan Utara, kemudian masuk ke Tol IKN Seksi 3A Segmen Karang Joang-KKT sepanjang 13,4 km, lalu masuk Seksi 3B Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,347 km, dan berakhir di Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang dengan panjang 6,675 km.

Dari Tol IKN ini, pengguna jalan kemudian masuk ke bentang panjang dan bentang pendek Jembatan Pulau Balang, sebelum masuk ke jalan nasional di wilayah Penajam Paser Utara. Tiba di lokasi tersebut, masyarakat bisa menggunakan Seksi 5B Segmen Jembatan Pulau Balang-Riko sepanjang 13,275 km yang berada di Kecamatan Penajam menuju KIPP IKN di Kecamatan Sepaku.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga



Adapun bagi yang menggunakan Jalan Nasional Sepaku-Semai telah disiapkan akses *bypass* Pasar Sepaku yang berada di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku. "Jadi kalau melalui jalan tol, dari [Jalan] Soekarno-Hatta menyambung ke Jembatan Pulau Balang, dan lanjut lagi ke jalan nasional. Karena banyak masyarakat yang melalui Jalan Sepaku-Semai, dengan jalan *bypass* Pasar Sepaku bisa cepat lagi, dua alternatif jalan ini dibuat," jelas Reiza.

Hal yang tak luput dipikirkan adalah mengatur jam operasional kendaraan yang bekerja pada pembangunan IKN. Bagaimanapun IKN masih dalam tahap pembangunan. Maka, hal tersebut juga dipikirkan seiring dengan pengaturan kedatangan tamu-tamu ke IKN. "Penyiapan lokasi kantong-kantong parkir juga dilaksanakan untuk 17 Agustus 2024 mendatang," tambah Reiza.

Aspek Lingkungan dan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur IKN untuk mendukung pelaksanaan HUT ke-79 RI diakui merupakan kerja bareng lintas kementerian dan lembaga. Dalam laman Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), dikabarkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan Rapat Kerja Teknis dengan tema "Konektivitas Transportasi Kalimantan Timur yang Terintegrasi dengan IKN."

Pada kesempatan tersebut, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa Rakornis ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara daerah penyangga IKN, yakni PPU, Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.

"Pentingnya rapat koordinasi teknis itu untuk membantu agar pergerakan *raw material*, pergerakan kebutuhan pangan untuk kepentingan IKN bisa berjalan dengan baik," ujar Malik. Menurutnya, koordinasi seperti ini penting untuk mendukung pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN.

Pemerintah membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk IKN bersifat inklusif. Bahkan, pembangunan ini bisa mendongkrak konektivitas daerah penyangga IKN. Hal tersebut diyakini banyak pihak, salah satunya diungkap Marjoni Rachman, Rektor Universitas 17 Agustus Samarinda.

“IKN itu pasti tumbuh, nanti daerah-daerah penyangga atau mitra itu pasti juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Saat ini saja proses pembangunan IKN masih berjalan daerah mitra sudah tumbuh dari ekonomi, pertumbuhan penduduk,” katanya dalam wawancara RRI beberapa waktu lalu.

Padahal, kata dia, infrastruktur di IKN belum semua rampung. Namun, jika sudah selesai 100 persen maka pertumbuhan di daerah penyangga akan lebih pesat lagi. “Nanti kalau semua sudah jadi, tentu saja daerah mitra akan tumbuh lebih pesat lagi. Bahkan saya yakin seluruh Kalimantan Timur tumbuh pesat kondisi ekonominya,” ujarnya.

Manfaat tersebut tak lepas dari pembangunan infrastruktur yang merata. “Manfaat berupa waktu tempuh yang lebih singkat dapat dirasakan oleh

masyarakat dengan adanya infrastruktur jalan terutama jalan tol akses IKN. Akses antar daerah penyangga seperti Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Samarinda akan tersambung melalui jalan tol tersebut,” kata Reiza.

Dalam membangun infrastruktur, pemerintah tak melepaskan aspek lingkungan. Walau yang dibangun adalah jalan dan jembatan, namun dalam pelaksanaannya tetap selaras dengan konsep IKN, yakni Smart Forest City.

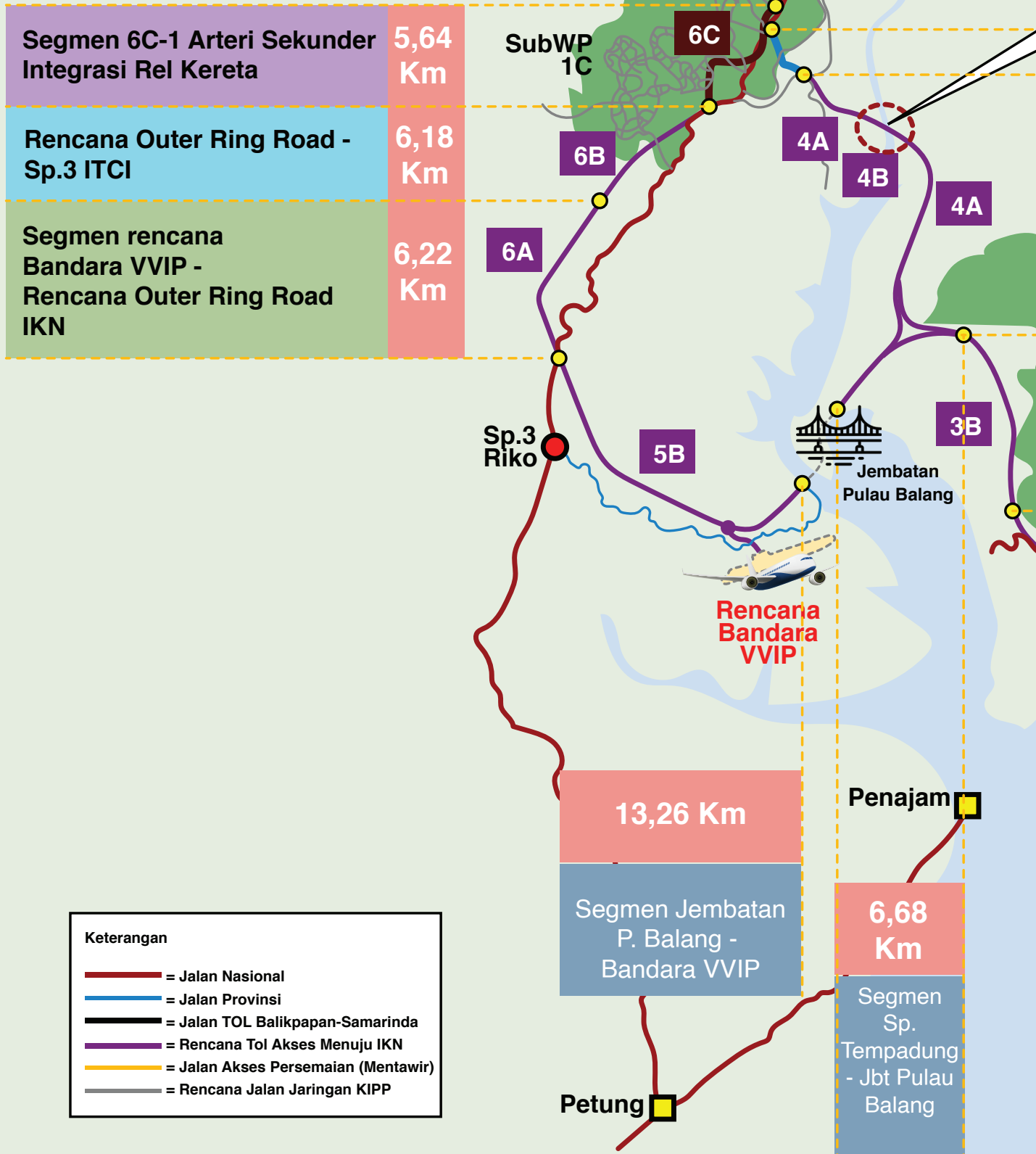
Kementerian PUPR, Persatuan Purnawira TNI-Angkatan Darat (PPAD), dan perusahaan-perusahaan pelaksana konstruksi di IKN telah sepakat untuk membangun persemaian pohon. Persemaian tersebut mampu menanam sebanyak 4.930 bibit pohon dan terdiri dari 100 jenis pohon endemik Jawa.

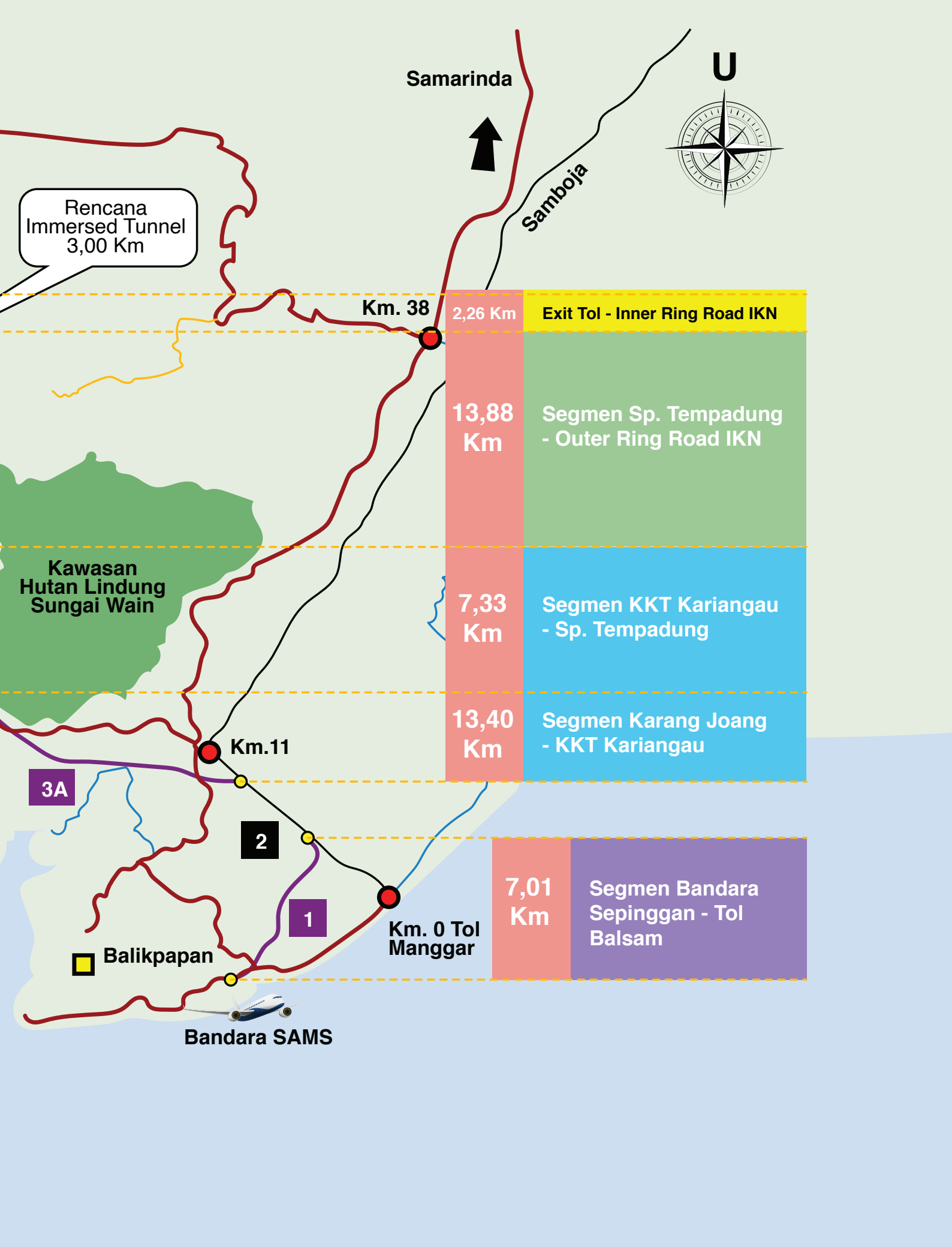
Sebagai hasil dari persemaian pohon tersebut, 90% dari tanaman yang dipelihara telah ditanam pada lereng Jalan Tol IKN Segmen 3B sepanjang 6 km. Berbagai jenis pohon yang ditanam, yakni pohon mahoni, kenari, angkana, pule, merbau, dan lainnya. Targetnya, sebanyak 41.794 bibit tanaman didistribusikan pada sembilan paket proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

JARINGAN KONEKTIVITAS IKN





Ditjen Bina Marga Sigap Tangani Bencana di Sumbar



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas dari Presiden untuk menangani bencana yang melanda Sumatra Barat (Sumbar). Ditjen Bina Marga pun siap mendukung kinerja Kementerian PUPR dengan segera membuka akses.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, pihaknya bertanggung jawab untuk pemulihan sarana prasarana umum, terutama jalan dan air bersih. Sesaat setelah bencana terjadi, beberapa alat berat langsung dikerahkan. Makin cepat akses terbuka, proses evakuasi dan penyaluran bantuan bisa berjalan dengan optimal.

Banjir dan longsor yang melanda Sumbar terjadi setelah curah hujan yang tinggi pada Sabtu – Minggu, 11-12 Mei 2024. Hal tersebut menyebabkan luapan 4 sungai di bagian hilir, yakni Sungai Batang Malana, Sungai Batang Bangkahan, Sungai Batang Bengkawas, dan Sungai Batang Katiak hingga menggenangi permukiman warga. Banjir makin diperparah karena libasan material vulkanik dan lahar dingin dari erupsi Merapi yang terjadi sebulan sebelumnya.

Daerah yang mengalami dampak terparah adalah Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Berdasarkan data sementara BNPB, pada 16 Mei 2024 pukul 17.00, bencana banjir dan longsor di Sumbar menyebabkan 228 rumah rusak berat, 149 rumah rusak sedang, dan 144 rumah rusak ringan.

Selain itu, bencana di Sumbar juga merusak 30 fasilitas ibadah, 36 jembatan, 11 fasilitas pendidikan, 70 saluran irigasi, 1 fasilitas kesehatan, 49 toko, 3 warung, dan 24 jalan. Kemudian, 411,5 hektar sawah dan 31.985,5 hektar lahan terdampak bencana.

Jumlah korban mencapai 63 korban jiwa. Rinciannya, di Tanah Datar 32 orang, di Agam 24 orang, di Padang Panjang 2 orang, dan di Padang 2 orang, serta 3 orang lainnya meninggal dengan bagian tubuh yang belum teridentifikasi. Sementara itu, sebanyak 10 orang lagi di Tanah Datar belum ditemukan. Upaya pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan yang berlangsung sejak 11 Mei lalu telah dihentikan.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Thabrani, menjabarkan kerusakan jalan akibat bencana. Titik-titik kerusakan tersebut tersebar di kabupaten/kota berikut yaitu Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

“Terjadi kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan nasional sejumlah 46 titik longsor jalan, yakni longsor lereng atas dan lereng bawah, serta *scoring*

abutment jembatan di 3 lokasi jembatan di 7 ruas jalan,” kata Thabrani dalam keterangan tertulisnya untuk Buletin Bina Marga, Minggu, 30 Juni 2024.

Kerusakan terparah dan tergolong paling kritis, lanjut Thabrani, ada 16 titik. Titik itu tersebar di Ruas Jalan Bts Kota Padang Panjang – Sicincin: 14 titik, lokasi (Km 61+500 - 66+700) dan Ruas Jalan Sutan Syahrir (Padang Panjang): 2 titik, lokasi (Km.67+100 - 67+800).

Selain menggerakkan alat berat, tim dari BPJN Sumbar terjun untuk memastikan informasi kejadian bencana. Mereka mengidentifikasi lokasi, titik kerusakan, jenis kerusakan dan dampak yang ditimbulkan. Data yang didapat di lapangan dipakai untuk mengambil langkah-langkah penanganan tanggap darurat yang diperlukan bersama pimpinan Ditjen Bina Marga. Saat pelaksanaannya, BPJN Sumbar melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Wilayah Sungai Sumatera V, TNI/POLRI dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Contoh penanganan yang dilakukan adalah memasang rambu-rambu peringatan dan *safety line*. Untuk jalan yang rusak, tim BPJN Sumbar menutup bagian jalan dan lereng dengan terpal. Supaya akses terbuka, material longsor dan drainase dibersihkan, menimbun kembali badan jalan yang putus dan amblas. “Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meminimalisir kerusakan dan agar jalan segera fungsional. Serta, berkoordinasi dengan baik kepada pimpinan dan semua pihak terkait,” ujar Thabrani.

Langkah Pemulihan

Masa tanggap darurat yang berlangsung sekitar sebulan sudah berakhir. Saat ini, Provinsi Sumatra Barat memasuki masa transisi ke pemulihan. “Sekarang Sumbar pindah ke status transisi darurat ke pemulihan, lamanya 6-7 bulan,” kata Ilham Wahab, Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Minggu, 9 Juni 2024.

Menurut Ilham, beberapa pekerjaan di masa tanggap darurat sudah selesai. Pekerjaan yang dimaksud mencakup pencarian dan pertolongan korban, kondisi

bencana melandai, memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, dan memastikan warga mulai kembali beraktivitas normal.

Saat ini Sumbar fokus pada pemulihan darurat sarana dan prasarana, seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan tempat ibadah. Rumah warga yang rusak akibat bencana juga dibangun kembali atau diperbaiki pada masa transisi ini, termasuk rumah di zona rawan yang perlu direlokasi.

Di masa pemulihan ini, BPJN Sumatra Barat telah dan sedang membersihkan longsor di lima ruas jalan: Ruas Bts. Kota Padang – Sp. Lubuk Begalung Kota Padang; Ruas Bts. Prov. Riau – Bts. Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota; Ruas Sp. Kumpulan – Sp. Taman, Bts. Kota Lubuk Sikaping-Sp. Kumpulan; Dan ruas Panti – Bts. Kota Lubuk Sikaping, Kabupaten Agam.

“Kami juga melakukan penimbunan kembali badan jalan yang putus dan amblas di dua ruas jalan yaitu ruas Padang Panjang – Sicincin dan ruas Jl. Sutan Syahrir (Padang Panjang) dan saat ini sedang dikerjakan konstruksi permanen hingga fungsional,” papar Thabrani.

Thabrani melanjutkan, pihaknya menargetkan ruas jalan Padang Panjang – Sicincin bisa beroperasi fungsional dua arah pada tanggal 21 Juli 2024. Diharapkan tanggal 30 Oktober 2024 pekerjaan sudah selesai dan jalan bisa beroperasi penuh.

Di masa pemilihan ini, BPJN Sumbar berterima kasih dan menaruh harapan kepada masyarakat terdampak. Berkat dukungan dan pengertian masyarakat maka pihaknya bisa bekerja dengan baik dan optimal. Untuk mempercepat masa pemilihan, diharapkan masyarakat dapat mematuhi himbauan pemerintah, seperti menggunakan jalan alternatif yang disediakan.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Keselamatan adalah Harga Mati dalam Proyek Infrastruktur



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Konstruksi infrastruktur harus menjamin keselamatan, mulai dari pembangunan sampai infrastruktur tersebut beroperasi. Insan Kementerian PUPR diminta untuk menjaga betul faktor ini supaya bisa mewujudkan *zero accident* dan infrastruktur yang dibangun andal serta berkelanjutan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin dalam webinar dengan tema “*Lesson Learn* Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan serta Evaluasi Pengoperasian Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) pada Ruas Jalan KPB di Sumatra Selatan, Selasa, 28 Mei 2024.

“PU dituntut bekerja dengan cepat tapi tetap kita harus menjaga keselamatan dan (ada) waktu (bagi kita) untuk evaluasi,” kata Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan dalam sambutan membuka webinar.

Menurut Yudha ada 2 topik bahasan dalam webinar ini. Pertama, “*Lesson Learn* Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan” terkait dengan insiden jatuhnya girder yang hendak dipasang dalam proyek

pembangunan *flyover* di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, Kamis, 7 Maret 2024. Girder tersebut lalu menghantam kereta api batu bara rangkaian panjang (Babaranjang). Kejadian ini mengakibatkan satu pekerja tewas dan enam lainnya luka-luka.

Yudha berharap, melalui webinar ini semua pihak terkait dapat mengevaluasi risiko dan manajemen keselamatan. Setiap proyek harus punya manajemen risiko yang komprehensif. “Petugas di lapangan harus punya kemampuan mumpuni dalam mengoperasikan alat berat, dalam hal ini *crane*. Pengawasan dan inspeksi harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Dan setiap proyek harus punya tanggap darurat. Jika ada kecelakaan harus cepat dan efektif dalam bertindak.”

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola dan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Achmad Gani Ghazaly Akman mengatakan bahwa keamanan jalan dan terowongan jalan adalah isu kritis yang mempengaruhi keselamatan pengguna jalan dan umur konstruksi. "Kegagalan konstruksi merugikan dari sisi biaya dan waktu, juga permasalahan hukum yang mengikuti. Kita hendaknya terus belajar untuk menjamin keamanan konstruksi."

Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama Herry Vaza sebagai narasumber mendorong seluruh tim di lapangan agar melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan dengan peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). "Kalau kita bangun jembatan, kita mesti mengacu asosiasi *bridge and structure engineering* (*International Association for Bridge and Structural Engineering* - IABSE)."

IABSE atau Asosiasi Internasional untuk Rekayasa Jembatan dan Struktural, adalah organisasi nirlaba dengan misi untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan dan memajukan praktik rekayasa struktur di seluruh dunia dalam melayani profesi dan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek teknis.

Isu keselamatan jalan yang juga disinggung dalam webinar adalah pengaruh kendaraan ODOL (*Over Dimension Over Loading*), yakni kendaraan yang melebihi batas maksimum dimensi dan/atau muatan yang ditetapkan oleh peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kendaraan ODOL menjadi perhatian khusus di proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang 29,87 km, terdiri dari enam ruas jalan dan 14 jembatan. Ini adalah proyek pertama non tol yang menggunakan pembiayaan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ruas jalan yang dipreservasi meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan Mahmud

Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Fasilitas UPPKB dilengkapi dengan *High Speed WIM* untuk mencegah kendaraan ODOL melintas, sehingga umur jalan dan jembatan bisa lebih lama.

Menurut Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama KGS Saiful Anwar, untuk menjaga kualitas dan pemeliharaan jalan, ada dua UPPKB di Sumsel. "UPPKB atau yang dikenal dengan Jembatan Timbang ini berada di Talang Kelapa dan Kertapati. Ada 23 UPPKB di Pulau Sumatra di bawah KPBU AP," ujarnya yang menjadi narasumber di webinar yang dimoderatori Sugiyartanto, Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama Ditjen Bina Marga.

Menurutnya, UPPKB dijalankan melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian. Dalam praktiknya, operasional UPPKB terkendala oleh verifikasi data kendaraan yang melintas tidak ada di *database* UPPKB. Sehingga hal ini mempersulit petugas dalam melakukan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. "Juga masih ada praktik pungli dan premanisme. Juga mohon ditinjau lagi besaran denda yang hanya maksimal Rp500 ribu, tidak sebanding dengan nilai kerusakan infrastruktur," papar Saiful.

Ke depan, semoga semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi sungguh menjunjung tinggi faktor keselamatan. Komitmen serupa juga diharapkan dipegang oleh masyarakat luas sebagai penerima manfaat pembangunan infrastruktur. "Karena kesadaran pengemudi masih rendah," ungkap Saiful.



SCAN UNTUK MELIHAT VIDEO





SIGAP TANGANI BENCANA. Ditjen Bina Marga sigap ambil peran saat bencana melanda. Sesaat setelah bencana terjadi, beberapa alat berat langsung dikerahkan. Makin cepat akses terbuka, proses evakuasi dan penyaluran bantuan bisa berjalan dengan optimal. Inilah yang juga dilakukan saat banjir dan longsor melanda Sumatra Barat setelah hujan deras pada Sabtu-Minggu, 11-12 Mei 2024.

Jalan Jayapura-Wamena Dibangun Melalui KPBU Senilai Rp3,3 Triliun

Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan segera dilakukan. Menyusul telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.



Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersyukur pembangunan bisa dimulai. Ruas ini telah diimpikan terbangun sejak pemerintahan Presiden Soeharto.

“Bayangkan, beberapa puluh tahun yang lalu beliau (Presiden Soeharto) sudah membuat *statement* untuk menghubungkan Jayapura-Wamena untuk jalur logistik, untuk menurunkan harga kemahalan. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, akhirnya pada hari ini kita akan memulai pembangunan ini,” ujar Basuki.

Hal yang istimewa, proyek senilai Rp3,339 triliun ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Perjanjian KPBU ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Marga dan Direktur Utama PT Hutama Mabelim Trans Papua, perjanjian penjaminan oleh Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Direktur Utama PT Hutama Mabelim Trans Papua, serta perjanjian regres oleh Menteri PUPR dan Direktur Utama PT PII.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR. Menurutnya, Kementerian PUPR adalah kementerian pionir dan terbanyak menggunakan skema KPBU.

Segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 50,14 km yang akan dibangun dengan skema KPBU ini merupakan bagian dari ruas Jayapura-Wamena. Masa konsesinya selama 15 tahun yang terdiri dari dua tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan.

Infrastruktur yang dibangun di ruas ini meliputi jalan, jembatan, dan fasilitas penimbang. PT Hutama Mabelim Trans Papua selaku badan usaha pelaksana mencakup serangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap pembiayaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, hingga pengoperasian dan pemeliharaan baik selama masa konstruksi maupun masa layanan. Setelah masa layanan berakhir, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) akan melaksanakan pengambilalihan proyek KPBU. (gir).

Ditjen Bina Marga Tingkatkan SDM Bidang Kompetensi Umum



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga mengadakan acara Pekan Pengembangan Kompetensi Umum. Tujuannya supaya pegawai makin memiliki integritas dan profesional.

“Tujuan dari kegiatan hari ini adalah menciptakan pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga khususnya yang membidangi komunikasi publik, keuangan dan kepegawaian yang berintegritas tinggi yang berkinerja tinggi dan profesional,” kata Ande Akhmad Sanusi Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Bina Marga saat membuka acara Wisma Bima II Bali, Senin, 29 Maret 2024.

Menurut Ande, yang mewakili Sekretaris Ditjen Bina Marga, pengembangan kompetensi pegawai ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN untuk mewujudkan pegawai yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional.

Untuk pegawai bidang komunikasi publik sesinya pada tanggal 29 April 2024. Tema yang dibahas adalah

“Bimbingan Teknis Pelatihan Voice Over,” dalam pembuatan video. “Satu hal yang perlu kita kuasai yaitu *voice over*. Dengan harapan bahwa pembangunan infrastruktur yang sangat masif ini informasinya bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Ande.

Agenda serupa akan dilanjutkan pada tanggal 2 - 3 Mei 2024 untuk Bimbingan Teknis Bidang Kepegawaian yang akan dilaksanakan di kantor Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bali. Sedangkan untuk Pengelolaan Keuangan di Wisma Bima II.

Hal yang disampaikan untuk bidang kepegawaian adalah tata cara penjatuhan sanksi disiplin, tata cara proses administrasi jabatan fungsional (jafung), bahkan sampai ke soal perceraian.

“Untuk bidang keuangan, substansi yang akan disampaikan adalah tata cara pemotongan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak, penilaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), dan tata cara sertifikasi SNT dan BNT,” tutup Ande.

PUPR Lanjutkan Pembangunan Jalan Tol Berjuluk 'Atlantis'

Jalan Tol Semarang-Demak dipastikan berlanjut. Pembangunan yang masuk proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 26,84 km itu akan menjadi ruas komplementer dari Jalan Nasional Pantura Jawa yang menghubungkan Semarang - Demak - Gresik - Surabaya.

“Mengingat peran vitalnya sebagai jalur logistik di utara Jawa, penyelesaian Ruas Tol Semarang - Demak sudah ditunggu masyarakat,” kata Endra S.

Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR di Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024.

Kementerian PUPR menjelaskan, PT PP Semarang Demak (PPSD) bertindak sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yang menggunakan skema SBO-T (*Supported, Build, Operate, and Transfer*). Jalan tol tersebut terdiri atas porsi investasi BUJT pada ruas Sayung - Demak sepanjang 16,31 km yang berada di daratan dan telah beroperasi sejak 25 Februari 2023.

Sedangkan porsi Pemerintah pada ruas Semarang - Sayung sepanjang 10,64 km yang berada di atas laut dan terbagi menjadi 3 paket yang saat ini dalam tahap konstruksi dengan progres fisik secara keseluruhan mencapai 9,25%. Target penyelesaian konstruksi keseluruhan paket tersebut adalah pada Februari 2027.

Untuk porsi pemerintah, kontraktor pelaksana Paket 1A adalah Utama Karya (HK) dan Beijing Urban Construction Group (BUCG), Paket 1B adalah Pembangunan Perumahan (PP), Wijaya Karya (WIKA) dan

China Road and Bridge Corporation (CRBC) serta Paket 1C adalah Adhi Karya dan Sinohydro. Sebagian dana pembangunan proyek ini bersumber dari pinjaman luar negeri.

Total nilai investasi Jalan Tol Semarang-Demak melalui BUJT PPSPD adalah sebesar Rp5,9 triliun yang terdiri atas 30% ekuitas (Rp1,78 triliun) dan 70% pendanaan (Rp4,1 triliun). Adapun porsi kepemilikan saham ekuitas (*equity share*) mayoritas sebesar 75,10% dimiliki oleh PT PP Persero Tbk, sedangkan sisanya sebesar 24,90% dimiliki oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pada tahun 2024, PT PP (Persero) Tbk merencanakan aksi korporasi untuk melakukan divestasi atau pelepasan sebagian sahamnya pada PT PP Semarang Demak sebesar 24,10% atau setara dengan Rp492 miliar.

Nantinya, kepemilikan saham PT PP Persero Tbk di BUJT PPSPD yang semula 75,1% menjadi 51,00% untuk antisipasi *cash deficiency support* pada Jalan Tol Semarang-Demak dengan mencari partner investor baru untuk mempercepat penuntasan ruas tol ini.

Tol Semarang-Demak dikenal sebagai Tol 'Atlantis' karena proyek ini dibangun di atas Laut Jawa sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut.

Foto: Dok. Ditjen Bina Marga



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Presiden Resmikan 165 Km Jalan Daerah di 15 Kota Sulawesi Tenggara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 22 ruas jalan sepanjang 165 km yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Total biaya yang dikeluarkan Rp42,4 miliar.

“Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2023 lalu telah diperbaiki 22 ruas jalan dengan biaya Rp631 miliar, dan sebanyak 2 ruas jalan ada di Kabupaten Muna Barat dengan biaya Rp42,4 miliar,” kata Jokowi saat peresmian, Senin, 13 Mei 2024.

Pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Tujuan Inpres ini supaya jalan-jalan di tiap kabupaten/kota bisa bagus.

“Tujuan pelaksanaan IJD utamanya untuk peningkatan konektivitas serta meningkatkan kemantapan jalan daerah, guna memperlancar arus logistik, serta akses ke pusat-pusat produksi,” kata Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra Freddy Siagian menyampaikan, ruas jalan yang ditangani dengan skema IJD adalah ruas Mekar Jaya-Sangia Tiworo di Kabupaten Muna Barat sepanjang 7 km dengan

biaya penanganan Rp21,4 miliar yang menjadi lokasi peresmian.

Untuk 21 ruas lainnya terdapat ruas Masara-Kambikuno di Kabupaten Muna Barat, ruas Wasolangka-Lamanu-Bente di Kabupaten Muna, ruas Kancebung-Lianabanggai di Kabupaten Buton Tengah, ruas Budi Utomo Baru di Kota Kendari, ruas Waode Buri-Petetea di Kabupaten Buton Utara.

Selanjutnya, penanganan IJD Sultra terdapat di ruas Salodongka-Lawata dan Lelewawo-Porehu & Bangsala-Ponggi di Kabupaten Kolaka Utara, ruas Teomokele-Enano di Kabupaten Bombana, ruas Unaasi-Bypass-Pesouha di Kabupaten Kolaka, ruas Ladongi Dalam Kota, dan Peatoa-Wungguloko di Kabupaten Kolaka Timur.

Di Kabupaten Konawe Selatan terdapat penanganan pada ruas Anese-Kapuwila, Basala dan Ambaipua-Motaha, selanjutnya terdapat ruas Simpang Tiga Batumea-Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii) dan Nambo Jaya-Roko Roko di Kabupaten Konawe Kepulauan, ruas Ambemali dan Waotobi-Batas Kabupaten Konut di Kabupaten Konawe, ruas Poros Kantalai-Palabusa di Kota Baubau, dan ruas Taipabau-Bante-Popalua serta ruas Waha-Patua-Veva di Kabupaten Wakatobi.

Ditjen Bina Marga Tingkatkan SDM untuk Tangani Aduan Publik



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Pelayanan terhadap aduan masyarakat merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu diperlukan SDM yang cukup dan kompeten dalam proses penanganan aduan masyarakat ini.

“Seluruh personal baik di pusat ataupun di Balai harus mengetahui prosedur yang tepat dan cepat dalam penanganan aduan masyarakat,” kata Satrio Sugeng Prayitno, Sekretaris Ditjen Bina Marga saat membuka *Workshop* Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Sp4n Lapor! di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 11 Juni 2024.

Ia berharap, seluruh peserta *workshop* selaku petugas SP4N LAPOR dan para Kabag/Kasubag Tata Usaha dapat belajar bagaimana menangani aduan masyarakat dengan cepat, tepat, tertib, dan mampu memberikan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting agar tercipta keadilan bagi pengadu dan yang diadukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kanal aduan masyarakat yang fokus digunakan oleh Ditjen Bina Marga adalah aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau yang disebut dengan SP4N LAPOR!.



Menurut Asisten Deputy Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat, Kementerian PANRB yang diwakili Novita Putri Evayanti, pengelolaan pengaduan ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Banyak yang menganggap bahwa pengaduan ini berada di ujung dari penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, sebenarnya pengaduan ini merupakan bahan utama dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kementerian PUPR sendiri telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan layanan publik. Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Taufan Madiasworo, menyebut ada 5 strategi yang diterapkan.

Strategi yang dimaksud adalah: Menjadikan pelayanan publik sebagai *top of mind*/prioritas dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas; Melaksanakan pelayanan publik sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan; Memastikan pelayanan publik dapat diakses secara inklusif dan berkeadilan;

Melakukan *continuous improvement* sebagai upaya untuk memperbaiki sekaligus mengembangkan suatu program secara berkelanjutan; Mengedepankan inovasi layanan publik melalui transformasi *mindset* layanan. Dalam hal ini sesungguhnya pemanfaatan layanan harus lebih aktif (prinsip *self-declaration*).

Ditjen Bina Marga Selenggarakan Raker untuk Percepat Kinerja

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Rapat Kerja Evaluasi Tengah Tahun pada 13-14 Juni 2024, di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Bina Marga, Hedy Rahadian, tujuan utama raker ini adalah membahas tindak lanjut paket kritis serta paket-paket konstruksi yang masih dalam tahap persiapan kontrak, proses lelang, belum lelang, dan gagal lelang. "Mendekati akhir semester I Tahun Anggaran (TA) 2024 ini capaian progres fisik dan keuangan Ditjen Bina Marga sudah cukup baik," simpul Hedy.

Namun demikian, lanjutnya, kinerja Ditjen Bina Marga tidak boleh kendor. Untuk itu, dia mendorong percepatan koordinasi dan pemecahan masalah bersama seluruh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/ BPJN) dan Balai Teknis. Dalam raker terungkap, data per 6 Juni 2024 menunjukkan progres fisik pekerjaan Ditjen Bina Marga sudah mencapai 35,03% dari rencana 36,63% sementara progres realisasi keuangan pada Rp15,754 triliun (25,15%) dari rencana progres Rp19,365 triliun (30,92%). Adapun pagu Ditjen Bina Marga TA 2024 senilai Rp62,63 triliun.

Hedy juga mengungkap beberapa permasalahan yang perlu dipecahkan. Tercatat ada 156 paket kritis, 36 paket

sedang dalam tahap persiapan kontrak, 142 dalam tahap proses lelang, 2 paket belum lelang, dan 2 paket gagal lelang.

Menurut SOP/UPM/DJBM-110 Revisi 02, paket kritis adalah pekerjaan yang pelaksanaannya masuk pada tiga periode kritis. Pertama, adanya deviasi realisasi fisik pelaksanaan dan rencana melebihi 10 persen pada lingkup rencana fisik 0-70 persen. Kemudian periode fisik pelaksanaan dan rencana melebihi 5 persen pada lingkup rencana fisik →70-100 persen. Periode ketiga saat, fisik pelaksanaan dan rencana melebihi 5 persen pada lingkup rencana fisik →70-100 persen namun akan melampaui tahun anggaran.

Sebagai tindak lanjut keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan rapat pembuktian atau *Show Cause Meeting* (SCM) bertahap tiga. Tahapan SCM ini akan menghasilkan keputusan pemberian kesempatan bekerja di masa denda atau putus kontrak kepada penyedia jasa.

Untuk paket pada tahap persiapan kontrak, proses lelang, belum lelang, dan gagal lelang harus mendapat perhatian khusus. "Jika paket-paket tersebut akan tetap dilaksanakan, maka paket harus tayang di LPSE paling lambat Juli 2024. Jika tidak, maka paket tersebut akan didrop," tegas Hedy dihadapan 330 peserta raker. (lan)



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Jalan yang Andal Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Infrastruktur adalah lokomotif perekonomian suatu negara, oleh karena itu perlu dipelihara supaya infrastruktur tetap dalam kondisi optimal. Salah satu metode pemeliharaan adalah dengan program padat karya tunai (PKT).

“Pemeliharaan infrastruktur tidak mudah. Perlu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat agar infrastruktur dapat berfungsi optimal, umur yang panjang, dan mencegah kerusakan yang lebih parah di masa yang akan datang,” kata Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, saat membuka Webinar Efektivitas Penanganan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Penyelarasan Pelaksanaan Program Padat Karya dalam Preservasi Jalan dan Jembatan, Selasa, 25 Juni 2024.

Menurut Yudha, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan bisa dilakukan melalui PKT. Program ini memiliki banyak keunggulan. Dengan melibatkan masyarakat setempat, PKT bisa membuka

lowongan pekerjaan, meningkatkan perekonomian, dan menimbulkan rasa memiliki terhadap infrastruktur. “Tantangannya adalah koordinasi antarlembaga, keterbatasan anggaran, dan kualitas pekerjaan.”

Untuk itu, Yudha berharap webinar ini dapat memberikan solusi yang tepat dan inovatif terkait pemeliharaan jalan dan jembatan, serta pelaksanaan PKT. Hal tersebut juga disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola dan Penata Laksana Jalan dan Jembatan, Achmad Gani Ghazaly Akman. “Kendala di lapangan seperti koodinasi dengan pihak2 terkait, masalah administrasi, bisa dicari solusinya,” harap Gani.

Ada beberapa faktor penyebab kerusakan jalan. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Utama Ditjen Bina Marga Pattiasina Jefry Recky memaparkan penyebabnya: Meningkatnya beban volume lalu lintas;



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Sistem drainase yang buruk; Kondisi tanah yang tidak stabil; Perencanaan perkerasan yang tidak sesuai; Dan kurangnya perawatan.

“Kerusakan pada perkerasan jalan atau lapisan penutup aspal harus diprioritaskan perbaikannya, karena di daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia, perkerasan dapat lebih cepat rusak,” kata Jefry sebagai narasumber.

Melihat kondisi ekonomi yang belum stabil, PKT menjadi solusi perbaikan jalan dan jembatan. “Dengan adanya proyek padat karya, perputaran ekonomi di daerah setempat dapat meningkat karena adanya aliran uang dari upah tenaga kerja yang digunakan untuk konsumsi lokal,” ujar Hari Suko Setiono, Penata Jalan dan Jembatan Ahli Utama Ditjen Bina Marga, yang hadir sebagai narasumber di webinar.

Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2024 melanjutkan PKT. Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan anggaran program PKT sebesar Rp2 triliun untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta kegiatan kontraktual (non rutin) tersebar di 1.487 lokasi.

Sebagaimana terekam dalam sistem E-Monitoring Kementerian PUPR per 20 Juni 2024, pekerjaan fisik PKT bidang jalan dan jembatan telah terealisasi 40,48% dengan serapan tenaga kerja 51.964 orang atau setara

1.823.063 Hari Orang Kerja (HOK). Capaian PKT tersebut meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin jalan seperti pembersihan median jalan dan pengecatan marka dengan progres fisik 39,39%. Kegiatan ini telah melebihi serapan tenaga kerja sebanyak 32.068 orang dari target 24.730 orang. Selanjutnya pemeliharaan rutin kondisi jalan dengan progres fisik 39,17% dan menyerap 3.521 tenaga kerja.

Pekerjaan PKT rutin juga disalurkan melalui pekerjaan pemeliharaan jembatan seperti pengecatan rangka jembatan. Pekerjaan fisik PKT pemeliharaan jembatan terealisasi 32,86% dan menyerap 11.071 tenaga kerja dari target 8.790 orang atau lebih besar dari target. Kemudian juga pekerjaan penunjang/*holding* jalan yang secara fisik telah mencapai 43,60% dan menyerap 1.765 tenaga kerja.

Selain pekerjaan rutin, PKT bidang jalan dan jembatan tahun 2024 juga disalurkan melalui pekerjaan kontraktual pada 328 paket pekerjaan penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi di 337 lokasi. Saat ini progres konstruksinya sudah mencapai 44,94% dengan serapan tenaga kerja 3.539 orang atau setara 84.583 HOK. Kegiatan PKT non rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya ke berbagai daerah di Indonesia.



SCAN UNTUK MELIHAT VIDEO



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Pelantikan dan Pisah Sambut Dirjen Bina Marga

Program Ditjen Bina Marga akan berlanjut sekalipun ada perubahan di pucuk pimpinan. Hal itu dipastikan dalam acara pisah sambut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga pada Senin, 24 Juni 2024.

Plt. Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian telah memasuki masa pensiun. Sebagai gantinya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melantik Rachman Arief Dienaputra sebagai Dirjen Bina Marga yang baru pada Jumat, 21 Juni 2024.

Pada saat pelantikan, Basuki meminta jajaran pejabat yang baru dilantik agar bekerja keras demi mempercepat pembangunan sesuai dengan program di tahun 2024. "Saya mohon dengan sangat kepada para pejabat yang baru, karena sudah mengetahui lingkup kerjanya masing-masing dengan baik, tidak ada waktu lagi untuk belajar. Kita harus bekerja keras dalam mempercepat pelaksanaan program 2024 ini," ujarnya.

Ia menyebutkan, hingga Juni 2024, progres pengerjaan program Kementerian PUPR telah mencapai sekitar 25%. Menurutnya, angka itu tercatat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. "Angka ini memang lebih besar dari tahun lalu, namun ini sudah memasuki bulan ke-6 sehingga kita harus berpikir keras untuk mempercepat

progres. Saya mohon agar dipikirkan betul percepatan pelaksanaan program dan mengevaluasi program yang sudah berjalan," jelasnya.

Hedy mengucapkan selamat datang kepada Rachman. Ia berharap segenap pimpinan dan seluruh jajaran Ditjen Bina Marga dapat selalu kompak dalam menjalankan tugas bersama membangun negeri. "Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa dan mohon maaf apabila dalam berinteraksi terdapat kesalahan dan kekhilafan," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Rachman bertekad akan melanjutkan desain dan program yang sudah dibangun sebelumnya. Untuk itu, ia berharap bantuan dan kerja sama dari segenap pimpinan dan jajaran Ditjen Bina Marga.

"Tugas saya melanjutkan apa yang sudah di-*setting* sebelumnya, dan menyelesaikan program yang sudah ada" tutur Rachman.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan perpisahan kepada Triono Junoasmono yang sebelumnya menjabat Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga yang kini telah dilantik menjadi Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR.

Bakal Ada Lomba Balap Gokart Listrik di IKN



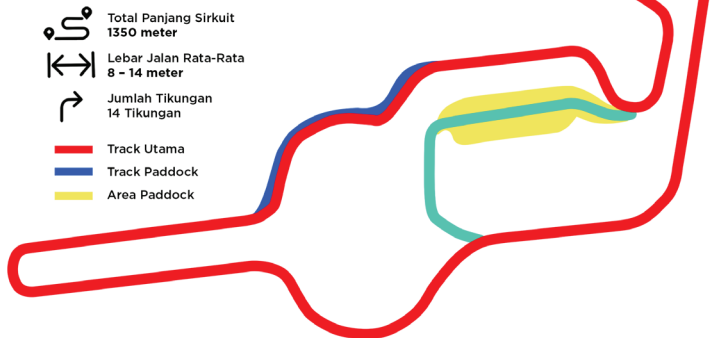
Lomba balap gokart listrik atau Electric Karting Race (EKR) kembali digelar tahun ini. Perlombaan ini diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga berkolaborasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Kompetisi ini akan memperebutkan Piala Menteri PUPR dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia serta *kick-off* rangkaian kegiatan Hari Jalan 2024. Menurut Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Yudha Handita Pandjiriawan, EKR tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini akan dilaksanakan dalam dua putaran.

Putaran pertama akan diselenggarakan selama dua hari pada 3 - 4 Agustus 2024 di Sirkuit Electric Vehicle (EV) Kementerian PUPR yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Sementara putaran kedua akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 30 November - 1 Desember 2024.

Sirkuit EV Kementerian PUPR

INFORMASI SIRKUIT :



Ketentuan Umur, Berat, dan Nomor Start Setiap Kelas

No	Kelas	Umur	Berat Minimum (termasuk Gokart)	No. Start
1	E-Karting Mini	7 - 13 Tahun	130 Kg	1 - 10
2	E-Karting Junior	11 - 13 Tahun	175 Kg	11 - 20
3	E-Karting Senior	15 - 31 Tahun	180 Kg	21 - 30
4	E-Karting Expert	32 Tahun keatas	180 Kg	31 - 40

"EKR ini merupakan lomba balap gokart listrik konversi satu-satunya di Indonesia yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)," kata Yudha saat Kick Off Electric Karting Race 2024 di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 27 Juni 2024.

Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga Yudi Hardiana sekaligus Ketua Penyelenggara EKR 2024 menambahkan, target peserta maksimum sebanyak 50 orang yang terbagi menjadi 4 kelas.

Rinciannya, kelas mini untuk peserta berumur 7 hingga 13 tahun, kelas junior untuk peserta berumur 11 hingga 15 tahun, kelas senior untuk peserta berumur 15 tahun ke atas, dan kelas expert untuk peserta berumur 32 tahun ke atas.

"Pendaftaran peserta dibuka sejak tanggal 1 Juni 2024 dan ditutup pada 15 Juli 2024," terang Yudi. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui laman <https://linktr.ee/electrickartingrace>. (gir)



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

111 Km Tol JORR 2 Tersambung Penuh Setelah Tol Cimanggis-Cibitung Diresmikan



Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Pembangunannya dilakukan sejak tahun 2016 dengan nilai investasi Rp10,6 triliun.

Dirjen Bina Marga Rachman Arief Dienaputra menambahkan, jalan tol ini terdiri dari 2 seksi yaitu Seksi 1 Ruas Junction Cimanggis-Jatikarya dan Seksi 2 Ruas Jatikarya-Cibitung. Seksi 2 terbagi dalam Seksi 2A Jatikarya-Cikeas dan seksi 2B Cikeas-Cibitung. Seksi 1 dan Seksi 2A sepanjang 6,5 km sudah beroperasi masing-masing sejak 2020 dan 2023, sementara Seksi 2B sepanjang 19,7 km yang diresmikan hari ini menjadi seksi terakhir yang akan segera dioperasikan.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meresmikan ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung. Lokasi peresmian dilakukan di Jembatan Sungai Cileungsi KM 57+400 Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dengan adanya ruas tol ini, perjalanan dari Bogor ke Bekasi yang biasanya 2 jam, sekarang hanya sekitar 30-45 menit. "Pastikan keberadaan jalan tol ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Implementasikan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola serta optimalkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan jalan tol ini," Ma'ruf Amin saat peresmian, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung ini menjadi ruas terakhir dari Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2). "JORR 2 akhirnya lengkap tersambung mulai dari Cengkareng hingga Cilincing. Kalau dari barat mau ke timur, tidak perlu masuk Jakarta dulu, bisa lewat tol ini saja langsung ke Cikampek. Jadi mengurangi kemacetan di dalam kota Jakarta," katanya di kesempatan yang sama.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 km ini adalah bagian dari jaringan Jalan Tol JORR 2 yang melintasi 4 wilayah, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi,

"Ruas ini membuat beban di dalam kota juga akan semakin berkurang. Pilihan yang baik bagi masyarakat yang akan bepergian dari Bogor (atau) Depok. Ke Bandung pun bisa lewat sini, Cibitung langsung ke Bekasi," ungkap Rachman.

Untuk saat ini, ia melanjutkan, tarif masih gratis. Biaya tol akan berlaku setelah uji coba pertama selama dua minggu. Lalu lanjut uji coba tahap kedua. "Uji coba kedua juga selama dua minggu, lanjut uji coba ketiga dua minggu, setelah itu baru diberlakukan tarif tol," papar Rachman.



SCAN UNTUK MELIHAT VIDEO



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Pembangunan Jalan Daerah Bisa Sampai Pelosok Berkat Inovasi LPSKT



Foto: Penerapan IJD di jalan akses Seko, Sulsel. Dok. Ditjen Bina Marga

Dari tahun ke tahun pemerintah terus menguatkan aksesibilitas di daerah-daerah terpencil, terdepan, dan terluar. Tujuannya memastikan pertumbuhan ekonomi merata di seluruh wilayah Indonesia. Terbaru, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Inpres yang ditandatangani Presiden pada tanggal 16 Maret 2023 tersebut diterbitkan dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Melalui Inpres ini, diharapkan perekonomian nasional maupun daerah dapat terdongkrak.

Selain itu, jalan bagus yang merata dapat menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi. Bahkan bisa memberi pengaruh positif pada perkembangan potensi wisata daerah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) tidak mulus untuk semua daerah. Setidaknya, hal

ini diungkap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan (Sulsel) Asep Syarip Hidayat.

Menurutnya, saat membangun jalan di daerah pedalaman umumnya sulit mendapatkan material agregat. Jika harus mendatangkan material dari luar tentu berdampak pada membengkaknya biaya pembangunan.

Situasi serupa juga dialami Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Osman H. Marbun dalam Jurnal HPJI (Vol. 6 No. 1 Januari 2020: 43-50), mengungkap masalah saat membangun ruas jalan



Merauke-Tanah Merah yang menghubungkan Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Jenis tanah yang ada di sepanjang ruas jalan tersebut adalah tanah aluvial, yang memiliki potensi kembang-susut tinggi akibat perubahan kadar air. Dalam pekerjaan konstruksi jalan, jenis tanah ini masuk dalam kategori tanah yang bermasalah, sehingga perlu distabilisasi sebelum digunakan sebagai lapis fondasi jalan.

Dalam perkembangannya, Asep dan Osman menerapkan inovasi Lapisan Pondasi Semen Komposit Tanah (LPSKT) sebagai alternatif untuk menggantikan Lapis Pondasi Agregat pada perkerasan jalan raya. "Teknologi LPSKT ini sudah diterapkan di sebagian wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Di Sulawesi Selatan sendiri teknologi ini baru pertama kali diterapkan, yakni pada Paket Pembangunan Jalan Sabbang - Tallang - Sae (Akses Seko) yang dimulai pada tahun 2023," ungkap Asep dalam acara Simantou Talkshow bertajuk 'Mengenal Teknologi Asbuton dan Lapis Pondasi Semen Komposit Tanah' Kamis, 18 April 2024.

Pembangunan Akses Seko dilakukan melalui skema IJD dengan total panjang 32,12 km. Pada tahun 2023 sudah dikerjakan sepanjang 16,7 km. Kemudian dilanjutkan tahun ini untuk menuntaskan 15,42 km. Sedangkan aplikasi di Papua lebih panjang lagi. Panjang jalan Merauke-Tanah Merah mencapai 425 km yang terbagi 9 ruas jalan nasional, meliputi: Jalan Ahmad Yani di Merauke sepanjang 0,25 km; Jalan Raya Mandala

di Merauke sepanjang 5,05 km; KM 40 hingga Batas Kota Merauke sepanjang 34,70 km; Sota hingga KM 40 sepanjang 38,30 km; Bupul hingga Erambu Sota sepanjang 110,70 km; Muting hingga Bupul sepanjang 37,88 km; Batas Kabupaten Boven Digoel Merauke hingga Muting sepanjang 47,03 km; Getentiri hingga Batas Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel sepanjang 77,70 km; Dan Tanah Merah hingga Getentiri sepanjang 73,20 km.

Penerapan LPSKT

Menurut Asep, LPSKT adalah campuran tanah, semen, air, dan bahan tambah jika diperlukan yang dipadatkan sehingga membentuk material baru *soil-cement* yang memiliki ikatan kuat dan kedap air (*impermeable*). Untuk saat ini, teknologi LPSKT sedang diperkenalkan dengan penambahan berupa bahan *additive* yakni bisa berupa jenis *liquid* atau *powder*. Keduanya sama-sama berfungsi untuk menggantikan semen.

"Karena sulitnya membawa material agregat kelas A dan kelas B, kita memilih menggunakan LPSKT sebagai fondasi untuk membangun jalan ini. Setelah melakukan pengujian tanah dengan dicampur material semen yang kemudian dilakukan pembentukan elevasi dan pemadatan awal, lalu terakhir akan diaspal dan ditutup terpal untuk dilakukan *curing* setelahnya," papar Asep.

Penggunaan teknologi LPSKT ini memiliki kelebihan. Dari sisi biaya, LPSKT lebih murah. Sedangkan dari segi waktu, pembangunannya relatif lebih cepat dibandingkan lapis fondasi agregat. Selain itu, penggunaan LPSKT ini kekuatannya cukup tinggi dan cocok untuk konstruksi yang membutuhkan material kuat dan tahan lama.



Kejuaraan Gateball Nasional Beri Efek Ekonomi ke Kota Tangerang



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga menyelenggarakan Kejuaraan Nasional Gateball 2024 pada 26 – 28 April 2024 di Lapangan Ahmad Yani, Alun-alun Kota Tangerang, Banten.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Budiamin. Menurutnya, peserta yang hadir mencapai 37 kontingen dari seluruh provinsi. Untuk itu, pelaksanaan lomba tidak bisa dilakukan di Kementerian PUPR. Mereka memperebutkan piala bergilir Direktur Jenderal Bina Marga.

“Lapangan Gateball di Kementerian PUPR baru ada dua apalagi jumlah pesertanya banyak. Akhirnya, kami pilih lokasi ini untuk penyelenggaraan lomba,” kata Budiamin, Jumat, 26 April 2024.

Menurutnya, turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi semata. Melalui gateball ini kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan semangat sportivitas,

produktivitas, dan untuk meningkatkan sinergitas serta kebersamaan antar peserta sesama Keluarga Besar Ditjen Bina Marga.

Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kejuaraan Gateball Ditjen Bina Marga Christoforus M.T Lasmono menyampaikan, jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan gateball mencakup 33 Tim Balai Jalan Nasional dari seluruh Indonesia. Juga ada 4 Tim Gateball dari Bina Marga Pusat, Balai Teknik, Dharma Wanita Persatuan (Bina Marga), dan Pemerintah Kota Tangerang.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Kaonang mengaku senang menjadi tuan rumah. “Mereka (peserta lomba) menginap dan makan di Kota Tangerang. Mereka juga belanja oleh-oleh di Kota Tangerang. Pastinya ini menjadi bagian penggerak geliat ekonomi masyarakat Kota Tangerang.”



SCAN UNTUK MELIHAT VIDEO

Jalan Nasional Sulsel Pakai 21.000 Ton Aspal Buton



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJ) Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menggunakan puluhan ribu ton aspal buton (asbuton) sepanjang tahun 2023. Bentuk nyata dukungan pada produksi dalam negeri.

Pemanfaatan asbuton sebagian besar untuk paket pekerjaan preservasi jalan, baik pada tahun 2023 maupun paket berjalan pada tahun 2024. "Seluruh jalan kita baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, bisa menggunakan asbuton, dan tahun 2023 Sulawesi Selatan (Sulsel) menggunakan 21.000 ton asbuton untuk jalan nasional," ujar Asep Syarif Hidayat Kepala BBPJJ Sulsel, Selasa, 7 Mei 2024.

Asbuton termasuk dalam salah satu dari 21 komoditas hilirisasi strategis 2023. Hilirisasi ini merupakan kebijakan presiden yaitu memproduksi aspal bukan sebagai penambang melainkan produksi aspal. Dengan regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No 15 tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik TA 2023, Peraturan Menteri PUPR No 18 tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Asep menambahkan, penggunaan asbuton akan mengurangi impor aspal minyak sehingga menghemat devisa negara. Serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 78-86 persen.

Jenis asbuton yang digunakan untuk jalan yaitu asbuton butir B 5/20 (Buton Granular Asphalt/BGA), asbuton butir B 50/30 (Lawele Granular Asphalt/LGA), aspal pracampur, asbuton murni yang kemurniannya di atas 90 persen, dan campuran asbuton Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) untuk jalan dengan lalu lintas rendah.

"Produk asbuton yang sudah digunakan yang sifatnya butir dan semi ekstrak dan sekarang sedang mengarah ke semi ekstrak cuma yang untuk *full* ekstrak belum masif masih sedikit produksinya," tutup Asep.

9 Jembatan Tua di Jatim Diganti Dengan Biaya Rp591,9 Miliar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penggantian 9 jembatan dengan tipe Callender Hamilton (CH) di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Program penggantian jembatan lama ini merupakan bagian dari mitigasi risiko jembatan runtuh karena usia tua di atas 40 tahun, salah satunya karena dampak beban berlebih kendaraan (*overloading*).

“Dengan selesainya penggantian jembatan Callender Hamilton ini diharapkan konektivitas antarwilayah terus terjaga, bahkan semakin meningkat guna mendorong perekonomian masyarakat di Jawa Timur,” kata Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Kamis, 2 April 2024.

Proyek ini merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga dengan PT Baja Titian Utama sebagai Badan Usaha Pelaksana dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan biaya Rp591,9 miliar. Pekerjaan penggantian jembatan dilaksanakan selama 2021-2023 dengan total panjang penanganan 2.116 m.

Seluruh jembatan yang ditangani berada dalam sistem jaringan jalan nasional dan jalur logistik utama yang tersebar di 8 kabupaten, Provinsi Jatim.

Penggantian 9 jembatan di Jawa Timur bagian dari proyek nasional duplikasi/penggantian 37 jembatan dengan tipe Callender Hamilton selama 2021-2023. Selain Jatim, penggantian jembatan tipe Callender Hamilton juga selesai dilaksanakan di Provinsi Banten 3 jembatan, Jawa Barat 16 jembatan, dan Jawa Tengah 9 jembatan.



Foto: Dok. Ditjen Bina Marga



Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga 2024



Pelantikan dan Pisah Sambut Direktur Jenderal Bina Marga



PISAH SAMBUT **DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA**



Rachman Arief Dienaputra

Hedy Rahadian

Selamat atas dilantiknya
Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng.
sebagai Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.
Terima kasih atas dedikasinya Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc sebagai
Direktur Jenderal Bina Marga periode 2020-2024